

## ABSTRAKSI

Tesis yang berjudul Kewenangan Kejaksaan Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, dengan dibuat menggunakan metode penelitian secara normatif, penelitian yang ditujukan terhadap masalah peraturan perundangan yang mengatur mengenai kewenangan Kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi melalui JPN. Sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagi Instansi Kejaksaan sebagai upaya menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, khususnya melalui JPN.

Dalam tesis ini yang difokuskan adalah kewenangan Kejaksaan yang sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, khususnya mengenai Surat kuasa khusus atas pengajuan gugatan pengembalian kerugian keuangan negara dan dasar gugatan ganti kerugian keuangan negara atas putusan bebas yang dilakukan oleh JPN.

Semoga tesis ini bermanfaat untuk Kejaksaan khususnya mengenai kewenangan Kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.